



DOI: <https://doi.org/10.38035/jkis.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Strategi Komunikasi Humas DPR RI dalam Membangun Pemahaman Publik Tentang Fungsi Parlemen Melalui Program Edukasi Parlemen

Isanur Akhmala Sita¹, Yudie Aprianto²

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, isanursita@gmail.com

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, yudieaprianto@upnvj.ac.id

Corresponding Author: isanursita@gmail.com¹

Abstract: *The limited public understanding of parliamentary functions remains one of the challenges faced by the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) in building relationships with the public. To address this issue, the Public Relations Division of DPR RI organizes the Parliamentary Education Program aimed at students, university students, and the general public. This study aims to analyze the communication strategy employed by the Public Relations Division of DPR RI in building public understanding of parliamentary functions through the Parliamentary Education Program. This research used a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, documentation, and literature review. The data were analyzed using Miles and Huberman model with the assistance of Nvivo 12 software through coding, word frequency analysis, and node classification, and were subsequently interpreted based on Harold D. Lasswell's communication model. The findings reveal that the Public Relations Division of DPR RI fosters public understanding through the management of the communicator's role, the development of educational messages, the utilization of various communication media, and the adaption of communication to the characteristics of the target audience. These strategies have contributed to improving public understanding of parliamentary functions, changing perceptions toward DPR RI, and creating new perspectives regarding the role of parliament within the democratic system. The findings indicate that the Parliamentary Education Program serves not only as a means of disseminating information but also as a form of political education that strengthens public understanding of parliamentary functions.*

Keyword: *Communication Strategy, DPR RI Public Relations, Parliamentary Education Program, Public Understanding, Parliamentary Functions.*

Abstrak: Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi parlemen menjadi salah satu tantangan bagi DPR RI dalam membangun hubungan dengan publik. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman tersebut, Humas DPR RI menyelenggarakan Program Edukasi Parlemen yang ditujukan kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Humas DPR RI dalam membangun pemahaman publik tentang fungsi parlemen melalui Program Edukasi Parlemen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui

wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 melalui proses *coding*, *word frequency*, dan pengelompokan data ke dalam *node*, kemudian diinterpretasikan berdasarkan model komunikasi Harold D. Lasswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas DPR RI membangun pemahaman publik melalui pengelolaan peran komunikator, penyusunan pesan yang bersifat edukatif, pemanfaatan berbagai media komunikasi, serta penyesuaian komunikasi dengan karakteristik khalayak sasaran. Strategi tersebut menghasilkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi parlemen, perubahan persepsi terhadap DPR RI, serta terbentuknya sudut pandang baru mengenai peran parlemen dalam sistem demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Edukasi Parlemen tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi media edukasi politik yang memperkuat pemahaman masyarakat mengenai fungsi parlemen.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Humas DPR RI, Edukasi Parlemen, Pemahaman Publik, Fungsi Parlemen.

PENDAHULUAN

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih menjadi salah satu tantangan dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Survei Indikator Politik Indonesia 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI masih berada pada angka yang relatif rendah dibandingkan beberapa lembaga negara lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara fungsi yang dijalankan oleh lembaga legislatif dengan pemahaman masyarakat terhadap peran parlemen. Rendahnya tingkat kepercayaan publik tidak hanya dipengaruhi oleh penilaian terhadap kinerja lembaga, tetapi juga oleh keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPR RI. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman publik mengenai fungsi parlemen menjadi aspek penting dalam mendukung kualitas demokrasi di Indonesia.

Pemahaman masyarakat terhadap fungsi parlemen memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi politik dan pengawasan terhadap kebijakan negara. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai lembaga legislatif cenderung lebih aktif dalam mengikuti perkembangan isu-isu politik dan pemerintahan. Sebaliknya, rendahnya literasi politik dapat memunculkan persepsi negatif serta mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi landasan utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan semakin kuatnya posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi (Samagrahira, 2023).

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi representasi rakyat, DPR RI memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya dilakukan melalui kegiatan legislatif, tetapi juga melalui berbagai aktivitas komunikasi publik yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam konteks tersebut, Humas DPR RI memiliki peran sebagai penghubung antara lembaga legislatif dan publik melalui penyampaian informasi yang informatif dan transparan. Keberadaan Humas DPR RI juga berfungsi untuk membangun citra positif lembaga sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan parlemen. Peran tersebut menjadikan Humas DPR RI sebagai salah satu unsur penting dalam memperkuat hubungan antara parlemen dan masyarakat (Royandiah et al., 2022).

Sebagai pelaksana fungsi komunikasi publik, Humas DPR RI mengembangkan berbagai program edukatif untuk memperkenalkan fungsi dan peran parlemen kepada masyarakat. Program tersebut diwujudkan melalui kegiatan Kunjungan Edukasi Parlemen, Parlemen Remaja, dan Parlemen Kampus yang melibatkan pelajar maupun mahasiswa dari berbagai daerah. Kegiatan tersebut dikemas secara interaktif agar peserta dapat memperoleh

pengalaman belajar yang lebih mendalam mengenai mekanisme kerja DPR RI. Melalui pendekatan edukatif tersebut, masyarakat diharapkan mampu memahami pentingnya fungsi parlemen dalam sistem demokrasi Indonesia. Upaya tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat (Chandra et al., 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran komunikasi publik dan program edukasi dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Program Parlemen Remaja diketahui mampu meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai fungsi parlemen sekaligus mengubah persepsi negatif terhadap DPR RI (Prily et al., 2022). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa Humas DPR RI memiliki peran strategis dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat melalui kegiatan edukasi parlemen (Wiratna et al., 2022). Selain itu, penggunaan media sosial oleh Humas DPR RI juga terbukti mampu meningkatkan aksesibilitas informasi mengenai tugas dan kewenangan parlemen kepada publik (Yanto et al., 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Pada tingkat internasional, keterlibatan publik melalui kegiatan komunikasi dan edukasi dipandang sebagai salah satu fungsi utama parlemen modern. Hubungan yang kuat antara parlemen dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi lembaga legislatif di tengah perkembangan demokrasi kontemporer. Selain itu, mekanisme umpan balik dan partisipasi publik dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi parlemen. Kegiatan public engagement juga dipandang sebagai bagian integral dalam mendukung fungsi representasi yang dijalankan oleh parlemen modern (Leston-Bandeira & Siefken, 2023; Sheldon, 2023). Dengan demikian, komunikasi publik dan kegiatan edukasi memiliki posisi yang semakin penting dalam memperkuat hubungan antara parlemen dan masyarakat.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas strategi komunikasi humas, komunikasi publik lembaga pemerintah, serta edukasi politik kepada masyarakat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada strategi komunikasi secara umum, penggunaan media komunikasi, atau pembentukan citra lembaga. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana strategi komunikasi dijalankan dalam Program Edukasi Parlemen sebagai sarana membangun pemahaman publik mengenai fungsi parlemen. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum banyak menghubungkan proses komunikasi tersebut secara komprehensif melalui unsur komunikator, pesan, media, audiens, dan efek komunikasi dalam perspektif model komunikasi Harold D. Lasswell.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi komunikasi Humas DPR RI melalui Program Edukasi Parlemen berdasarkan lima unsur model komunikasi Harold D. Lasswell serta melihat bagaimana strategi tersebut berkontribusi dalam membangun pemahaman publik tentang fungsi parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi dirancang dan dijalankan oleh Humas DPR RI dalam pelaksanaan program tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan komunikasi publik pada lembaga legislatif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi politik dan public relations pada sektor pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis strategi komunikasi Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam membangun pemahaman publik mengenai fungsi parlemen melalui Program Edukasi Parlemen. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan Program Edukasi Parlemen, wawancara mendalam

semi-terstruktur dengan pemilihan informan internal dilakukan untuk memperoleh sudut pandang yang beragam terkait penelitian.

Tabel 1. Daftar Informan

No.	Inisial	Jabatan	Jenis Kelamin	terlibatan dalam Program Edukasi Parlemen
1.	MY	Kepala Subbagian Promosi, Diseminasi, dan Edukasi Publik	Wanita	Memiliki kewenangan dan pemahaman strategis terkait program
2.	AD	Pranata Humas DPR RI	Pria	Terlibat langsung dalam pelaksanaan program
3.	IK	Pranata Humas DPR RI	Wanita	Terlibat langsung dalam pelaksanaan program
4.	DD	Pranata Humas DPR RI	Pria	Terlibat langsung dalam pelaksanaan program
5.	DW	Pranata Humas DPR RI	Pria	Terlibat langsung dalam pelaksanaan program
6.	AK	Peserta Program Edukasi Parlemen	Wanita	Memberikan perspektif sebagai penerima pesan

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Penentuan informan dilakukan menggunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua individu memiliki pengetahuan dan keterlibatan yang memadai terhadap pelaksanaan Program Edukasi Parlemen. *Key Informant* terdiri atas Kepala Subbagian Promosi, Diseminasi, dan Edukasi Publik Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum DPR RI, serta Pranata Humas DPR RI. Selain informan internal, penelitian ini juga melibatkan satu peserta Program Edukasi Parlemen untuk memperoleh perspektif dari pihak penerima pesan sehingga dapat memperkuat proses triangulasi sumber. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, arsip, laporan kegiatan, publikasi resmi, foto, dan berbagai sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Seluruh data hasil wawancara direkam dan ditranskripsikan untuk memudahkan proses analisis data yang mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis didukung oleh perangkat lunak Nvivo 12 melalui *coding*, analisis *word frequency query*, serta pengelompokan data ke dalam node guna mengidentifikasi strategi komunikasi Humas DPR RI dalam Program Edukasi Parlemen. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan model komunikasi Harold D. Lasswell yang meliputi lima unsur utama yang dikenal sebagai formula 5W, yakni *Who*, *Says What*, *In Which Channel*, *To Whom*, dan *With What Effect* untuk memahami bagaimana Humas DPR RI membangun pemahaman publik mengenai fungsi parlemen melalui Program Edukasi Parlemen. Selanjutnya, keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari lima informan internal Humas DPR RI serta satu peserta Program Edukasi Parlemen sebagai representasi dari pihak penerima pesan. Proses validasi dilakukan dengan mencocokkan keterangan antar informan mengenai peran Humas, penyusunan pesan, pemilihan media, karakteristik audiens, serta dampak program terhadap pemahaman peserta. Informasi dari pihak internal Humas DPR RI dibandingkan dengan pengalaman peserta untuk melihat kesesuaian antara strategi komunikasi yang dirancang dan penerimaan pesan oleh audiens. Selain itu, hasil wawancara juga diperiksa melalui data observasi, dokumentasi kegiatan, publikasi media sosial, serta dokumen pendukung yang relevan.

memperlihatkan bahwa Program Edukasi Parlemen menjadi media utama dalam mengimplementasikan strategi komunikasi kepada masyarakat. Tingginya frekuensi kata tersebut juga menunjukkan bahwa para informan memandang keberadaan program sebagai instrumen yang mampu menghubungkan DPR RI dengan masyarakat secara lebih langsung. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada publikasi melalui media, tetapi juga diwujudkan melalui pengalaman komunikasi yang diperoleh peserta selama mengikuti kegiatan. Dengan demikian, program menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan komunikasi publik yang dilakukan oleh Humas DPR RI.

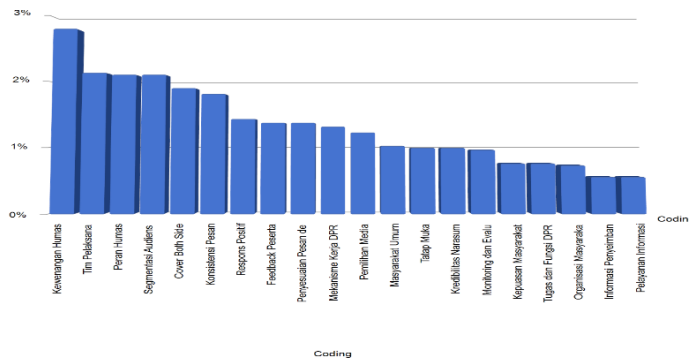
Selanjutnya kata “Humas” juga memiliki tingkat frekuensi yang tinggi dengan 0,90%, hal ini menunjukkan bahwa Humas DPR RI memiliki posisi sentral dalam pelaksanaan Program Edukasi Parlemen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada materi yang disampaikan, tetapi juga pada kemampuan Humas dalam mengelola proses komunikasi secara menyeluruh. Peran tersebut mencakup penyusunan pesan, pemilihan media, pengelolaan kegiatan, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan program. Tingginya intensitas pembahasan mengenai Humas menunjukkan bahwa fungsi kehumasan dalam konteks pemerintahan tidak lagi terbatas pada penyebaran informasi, tetapi juga mencakup fungsi edukasi dan pembangunan hubungan dengan publik. Dengan demikian, Humas DPR RI berperan sebagai aktor utama yang menjembatani kebutuhan informasi masyarakat dengan tujuan kelembagaan DPR RI.

Munculnya kata “masyarakat” dengan frekuensi 0,78% menunjukkan bahwa orientasi utama komunikasi yang dilakukan oleh Humas DPR RI adalah publik sebagai penerima pesan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek yang menerima informasi secara pasif, tetapi juga sebagai pihak yang menjadi fokus utama dalam perancangan komunikasi. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan pesan dan kegiatan dengan karakteristik audiens yang beragam. Tingginya frekuensi kata ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi diukur berdasarkan kemampuan program dalam memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menjadi elemen yang menentukan arah dan tujuan dari strategi komunikasi yang dijalankan.

Selanjutnya kata “media” dengan frekuensi 0.61% menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Program Edukasi Parlemen. Kemunculan kata tersebut mengindikasikan bahwa penyampaian pesan tidak hanya dilakukan melalui komunikasi tatap muka, tetapi juga melalui berbagai platform media yang digunakan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran Humas DPR RI terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi, khususnya di era digital. Selain berfungsi sebagai sarana distribusi informasi, media juga menjadi instrumen untuk membangun interaksi dan memperkuat keterlibatan masyarakat dengan program yang dijalankan. Oleh karena itu, pemanfaatan media menjadi salah satu unsur paling penting dalam mendukung efektivitas strategi komunikasi Humas DPR RI.

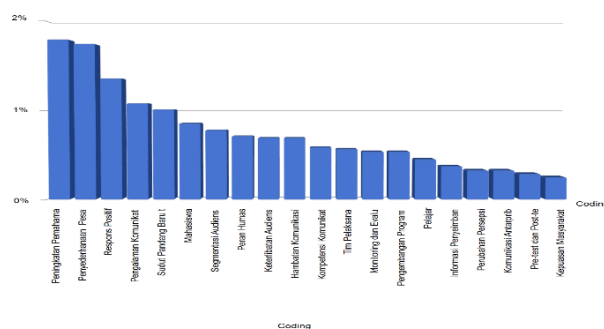
Hasil analisis dan proses *coding* menunjukkan bahwa kata-kata yang paling dominan dalam keseluruhan wawancara berkaitan dengan aspek edukasi, peran Humas DPR RI, pelaksanaan program, masyarakat sebagai sasaran komunikasi, serta pemanfaatan media dalam penyampaian pesan. Jika dikaitkan dengan model komunikasi Harold D. Lasswell, kemunculan kata-kata tersebut menunjukkan adanya keterhubungan antara unsur *who*, *says what*, *in which channel*, *to whom*, dan *with what effect* dalam pelaksanaan Program Edukasi Parlemen. Dominasi kata yang berkaitan dengan edukasi dan Humas menunjukkan pentingnya peran komunikator (*who*) dalam mengelola komunikasi publik, sedangkan kemunculan kata masyarakat dan media mencerminkan keterkaitan antara sasaran komunikasi (*to whom*) dan saluran komunikasi (*in which channel*) yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai fungsi parlemen (*says what*). Sementara itu, dominasi kata edukasi juga

menunjukkan bahwa tujuan utama komunikasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada terciptanya peningkatan pemahaman masyarakat sebagai efek komunikasi (*with what effect*).



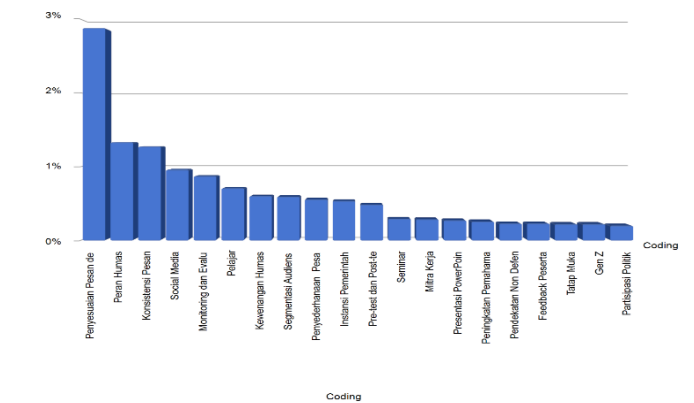
Sumber : Data Olahan Peneliti (2026)
Gambar 2. Hasil Coding Informan 1

Analisis terhadap hasil wawancara Informan 1 (MY) dilakukan menggunakan fitur *Coding* pada perangkat lunak Nvivo 12. Proses tersebut menghasilkan sejumlah tema yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Edukasi Parlemen serta strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas DPR RI. Visualisasi hasil *coding* menunjukkan bahwa tema “Kewenangan Humas” memiliki tingkat presentase paling tinggi dibandingkan tema lainnya. Selain itu, tema seperti “Tim Pelaksana”, “Peran Humas”, “Segmentasi Audiens”, “Cover Both Side”, dan “Konsistensi Pesan” juga memiliki tingkat kemunculan yang cukup dominan. Dominannya tema mengenai kewenangan Humas menunjukkan bahwa MY memandang keberhasilan Program Edukasi Parlemen sangat dipengaruhi oleh peran Humas DPR RI dalam menjalankan fungsi komunikasi publik. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan MY bahwa “Humas memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi, dan mekanisme kerja DPR RI”. Humas tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki kewenangan dalam merancang pesan, menentukan media yang digunakan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan program melalui tim yang terlibat. Selain itu, munculnya tema segmentasi audiens menunjukkan bahwa penyusunan pesan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik khalayak yang berbeda-beda. Hal tersebut diperkuat dengan adanya tema konsistensi pesan dan pemilihan media yang menggambarkan pentingnya menjaga kesesuaian antara isi pesan dengan saluran komunikasi yang digunakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan Humas DPR RI dilakukan secara terencana untuk memastikan pesan mengenai fungsi parlemen dapat diterima oleh masyarakat secara efektif.



Sumber : Data Olahan Peneliti (2026)
Gambar 3. Hasil Coding Informan 2

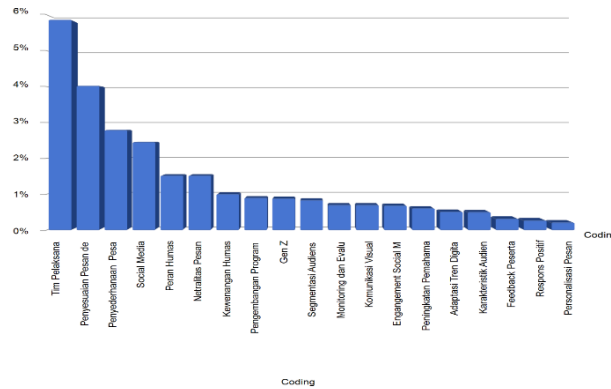
Hasil coding terhadap AD menunjukkan bahwa tema yang paling dominan adalah “Peningkatan Pemahaman” dan “Penyederhanaan Pesan”. Tema lain yang juga memiliki tingkat kemunculan cukup tinggi meliputi “Respons Positif”, “Pengalaman Komunikasi”, “Sudut Pandang Baru”, serta “Mahasiswa”. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Edukasi Parlemen dipersiapkan mampu memberikan pemahaman baru kepada peserta mengenai fungsi dan peran DPR RI. Berdasarkan hasil wawancara, AD menekankan pentingnya penyampaian pesan dengan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Menurut AD “kita sesuaikan bahasanya, kita sesuaikan tone-nya sama audiens supaya pesannya bisa nyampe”. Penyederhanaan pesan dianggap mampu membantu peserta memperoleh perspektif baru mengenai DPR RI yang sebelumnya cenderung dipahami secara terbatas. Selain itu, respons positif yang diberikan peserta menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan melalui Program Edukasi Parlemen mampu menciptakan pengalaman komunikasi yang berbeda dibandingkan informasi yang diperoleh melalui media massa. Munculnya tema keterlibatan audiens dan segmentasi audiens juga menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh kemampuan Humas DPR RI dalam menyesuaikan komunikasi dengan karakteristik peserta. Dengan demikian, Program Edukasi Parlemen tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk pemahaman baru di kalangan masyarakat.



Sumber : Data Olahan Peneliti (2026)

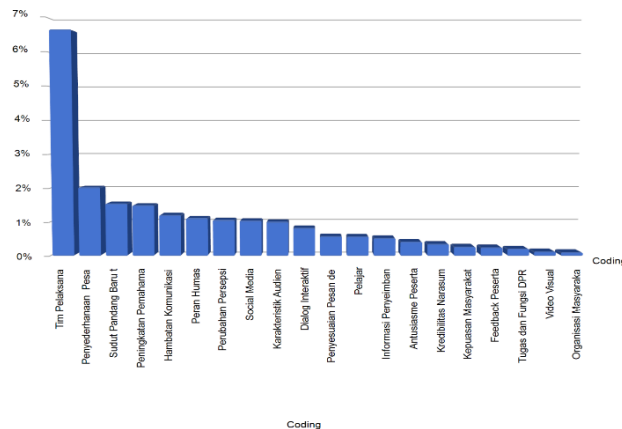
Gambar 4. Hasil Coding Informan 3

Hasil coding wawancara IK menunjukkan bahwa tema “Penyesuaian Pesan” memiliki tingkat kemunculan paling tinggi dibandingkan tema lainnya. Tema lain yang juga banyak muncul meliputi “Peran Humas”, “Konsistensi Pesan”, “Media Sosial”, “Monitoring dan Evaluasi”, serta “Segmentasi Audiens”. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian pesan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan strategi komunikasi Program Edukasi Parlemen. Dominasi tema penyesuaian pesan menunjukkan bahwa Humas DPR RI tidak menggunakan pendekatan komunikasi yang sama untuk seluruh khalayak. IK menjelaskan bahwa “kami menyesuaikan medianya, caranya, kemudian audiensnya”. Penyusunan pesan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta agar informasi mengenai fungsi parlemen dapat diterima dengan lebih mudah. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi juga menunjukkan adanya upaya untuk mengikuti perkembangan pola konsumsi informasi masyarakat, khususnya generasi muda. Adanya tema monitoring dan evaluasi memperlihatkan bahwa Humas DPR RI secara berkelanjutan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program guna meningkatkan efektivitas komunikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan audiens.



Sumber : Data Olahan Peneliti (2026)
Gambar 5. Hasil Coding Informan 4

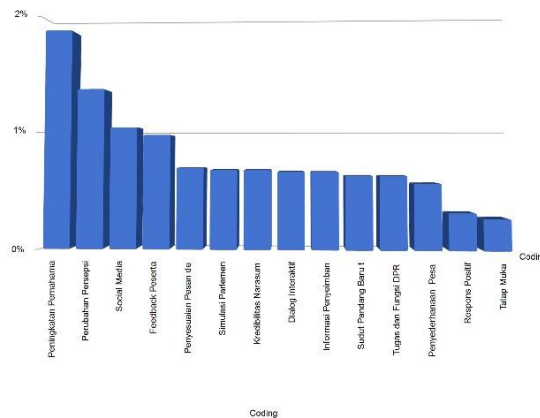
Hasil analisis menunjukkan bahwa tema yang paling dominan pada wawancara DD berkaitan dengan “Tim Pelaksana” dan “Penyesuaian Pesan”. Selain itu, tema mengenai “penyederhanaan pesan” “penggunaan media sosial”, serta “peran Humas” juga memiliki tingkat kemunculan yang cukup tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Edukasi Parlemen memerlukan koordinasi yang baik antar anggota tim serta kemampuan dalam menyampaikan informasi sesuai dengan karakteristik audiens. Munculnya tema media sosial menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan Humas DPR RI telah menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Selain itu, dominasi tema penyederhanaan pesan menunjukkan bahwa informasi mengenai fungsi parlemen berusaha dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat. DD menjelaskan bahwa “topik pembahasannya berat, jadi kita ringankan bahasanya”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penyebaran informasi, tetapi juga pada bagaimana pesan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh khalayak sasaran. Dengan demikian, perspektif DD menekankan pentingnya adaptasi komunikasi dalam mendukung efektivitas Program Edukasi Parlemen.



Sumber : Data Olahan Peneliti (2026)
Gambar 6. Hasil Coding Informan 5

Bedasarkan hasil *coding*, tema yang paling dominan pada wawancara DW adalah “Tim Pelaksana”. Selain itu, tema mengenai “Penyederhanaan Pesan”, “Perubahan Persepsi”, “Peningkatan Pemahaman”, serta “Karakteristik Audiens” juga memiliki tingkat kemunculan yang cukup tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Edukasi Parlemen tidak hanya dipengaruhi oleh isi pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh kerja sama

antar tim yang terlibat dalam pelaksanaan program. Munculnya tema perubahan persepsi dan peningkatan pemahaman menunjukkan bahwa Program Edukasi Parlemen memiliki dampak terhadap cara pandang masyarakat terhadap DPR RI. DW menjelaskan bahwa peserta sering memperoleh “*wow effect*” setelah mengikuti kegiatan dan memahami bagaimana DPR RI bekerja secara langsung. Selain itu, adanya tema karakteristik audiens menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan memperhatikan kebutuhan dan latar belakang peserta yang berbeda-beda. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan Humas DPR RI dalam membangun pengalaman komunikasi yang relevan bagi peserta. Dengan demikian, hasil wawancara DW memperlihatkan bahwa Program Edukasi Parlemen tidak hanya menghasilkan transfer informasi, tetapi juga mampu membentuk pemahaman dan persepsi baru mengenai fungsi parlemen.



Sumber : Data Olahan Peneliti (2026)
Gambar 7. Hasil Coding Informan 6

Hasil *coding* terhadap AK menunjukkan bahwa tema yang paling dominan adalah “Peningkatan Pemahaman” dan “Perubahan Persepsi”, sementara tema lain yang juga memiliki tingkat kemunculan cukup tinggi meliputi “Media Sosial”, “Feedback Peserta”, “Penyesuaian Pesan”, serta “Dialog Interaktif”. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Edukasi Parlemen dipersepsikan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai fungsi dan mekanisme kerja DPR RI serta membentuk pandangan yang lebih objektif terhadap lembaga tersebut. Berdasarkan hasil wawancara AK mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti program, pemahamannya mengenai DPR RI masih terbatas dan lebih banyak dipengaruhi oleh informasi dari media yang cenderung menyoroti sisi kontroversial DPR RI. AK menyatakan bahwa “setelah mengikuti program ini, saya jadi memahami bahwa ada banyak proses dan mekanisme yang dijalankan dalam pelaksanaan tugas DPR RI”. Selain itu, munculnya tema media sosial menunjukkan bahwa saluran komunikasi digital memiliki peran dalam mendukung penyebaran informasi mengenai Program Edukasi Parlemen, sedangkan tema feedback peserta mengindikasikan adanya keterlibatan peserta dalam memberikan masukan untuk pengembangan program. Kemunculan tema penyesuaian pesan, penyederhanaan pesan, dan dialog interaktif juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang sederhana serta komunikasi dua arah yang dilakukan oleh Humas DPR RI mampu membantu peserta memahami materi dengan lebih baik. Dengan demikian, Program Edukasi Parlemen tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga mampu menciptakan pengalaman komunikasi yang berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan perubahan persepsi peserta terhadap DPR RI.

Peran Humas DPR RI dalam Mengelola Komunikasi Publik

Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen memperlihatkan bahwa Humas DPR RI memiliki peran yang lebih luas dibandingkan sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan adanya keterlibatan Humas dalam proses perencanaan, pengelolaan pesan, hingga koordinasi pelaksanaan program. Humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengelola komunikasi publik yang menjembatani hubungan antara DPR RI dengan masyarakat. MY menjelaskan bahwa program dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat disusun oleh Pranata Humas bersama pejabat administrasi di lingkungan Bagian Humas dan Pengelolaan Museum sebelum memperoleh persetujuan dari pimpinan. Selain itu, Humas juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme kerja DPR RI kepada masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa memiliki posisi strategis dalam menentukan arah komunikasi yang dibangun oleh lembaga.

Keterlibatan berbagai unsur pendukung juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Edukasi Parlemen. DW menjelaskan bahwa “di situ nanti ada saya Pranata Humas sebagai narasumber. Nanti ada juga tim dari staf Humas sebagai tim yang akan memberikan *supporting system* dalam kelancaran kegiatan” (Wawancara, 20 April 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Edukasi Parlemen tidak bertumpu pada individu tertentu, melainkan merupakan hasil koordinasi berbagai pihak dalam satu sistem kerja yang saling mendukung. Dalam model komunikasi Harold D. Lasswell, unsur *who* menempatkan komunikator sebagai pihak yang menentukan arah komunikasi. Oleh karena itu, Humas DPR RI tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai aktor utama yang mengelola komunikasi publik secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan Royandiah et al. (2022) yang menjelaskan bahwa Humas DPR RI memiliki fungsi strategis dalam membangun hubungan dengan masyarakat melalui komunikasi yang informatif dan transparan.

Strategi Penyusunan dan Penyesuaian Pesan dalam Program Edukasi Parlemen

Upaya membangun pemahaman publik mengenai fungsi parlemen tidak hanya bergantung pada isi informasi yang disampaikan, tetapi juga pada kemampuan Humas DPR RI dalam mengemas pesan agar dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Materi mengenai fungsi parlemen yang cenderung kompleks menuntut adanya penyesuaian bahasa dan cara penyampaian agar lebih mudah dipahami oleh peserta yang berasal dari latar belakang yang berbeda. AD menjelaskan bahwa pesan mengenai DPR RI dikemas melalui berbagai kegiatan dan dialog interaktif. menurutnya, “kita kemas melalui berbagai kegiatan, melalui dialog interaktif. Kita juga sesuaikan bahasanya, kita sesuaikan tone-nya sama audiens supaya pesannya bisa sampe” (Wawancara, 20 April 2022). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Humas DPR RI tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga memperhatikan bagaimana pesan tersebut dapat dipahami oleh audiens.

Hal serupa disampaikan oleh DW yang menjelaskan bahwa materi yang diberikan kepada peserta disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan karakteristik mereka. Senada dengan hal tersebut, IK menjelaskan bahwa penggunaan bahasa kepada siswa sekolah dasar tentu berbeda dengan mahasiswa maupun masyarakat umum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh substansi pesan, tetapi juga oleh kemampuan komunikator dalam menyesuaikan pesan dengan karakteristik audiens. Dalam model lasswell, unsur *says what* tidak hanya berkaitan dengan isi pesan, tetapi juga dengan bagaimana pesan tersebut dikonstruksi agar mampu menghasilkan pemahaman yang diharapkan. Temuan ini sejalan dengan Salim dan Parlindungan (2021) yang menjelaskan bahwa penggunaan bahasa yang komunikatif dapat meningkatkan pemahaman, generasi muda mengenai fungsi DPR RI.

Pemanfaatan Media dalam Menjangkau Khalayak Program Edukasi Parlemen

Perkembangan teknologi informasi mendorong Humas DPR RI untuk memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dalam mendukung pelaksanaan Program Edukasi Parlemen. Penggunaan media tidak hanya terbatas pada komunikasi tatap muka, tetapi juga diperluas melalui media digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas, khususnya generasi muda. AD menjelaskan bahwa sebagian besar program yang dijalankan Bagian Humas dan Pengelolaan Museum berbasis komunikasi langsung dengan masyarakat. Menurutnya, “program-program kita itu mayoritas adalah program yang berdialog langsung sama masyarakat, berbasis event supaya ada pendekatan personal” (Wawancara, 20 April 2026). Sementara itu, DD menjelaskan bahwa Instagram dan Tiktok dipilih karena sesuai dengan karakteristik target audiens yang didominasi oleh generasi muda. Pemanfaatan media sosial juga diperkuat oleh pernyataan DW yang menjelaskan bahwa media digital membantu mendiseminasikan informasi sekaligus memperkenalkan Program Edukasi Parlemen kepada masyarakat.

Keberadaan media dalam Program Edukasi Parlemen tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi informasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi komunikasi yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Dalam perspektif Lasswell, unsur *in which channel* menekankan pentingnya pemilihan saluran komunikasi yang sesuai agar pesan dapat diterima secara efektif oleh khalayak. Temuan ini sejalan dengan Yanto et al. (2024) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan media digital oleh Humas DPR RI berkontribusi dalam memperluas akses informasi serta meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu parlemen.

Penyesuaian Komunikasi terhadap Karakteristik Masyarakat sebagai Sasaran Program

Keberagaman karakteristik peserta menjadi salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan Program Edukasi Parlemen. Peserta yang mengikuti program ini berasal dari berbagai jenjang pendidikan dan latar belakang yang berbeda, mulai dari siswa sekolah dasar, pelajar tingkat menengah, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Perbedaan tersebut menyebabkan kebutuhan informasi serta tingkat pemahaman peserta terhadap isu-isu parlemen juga tidak seragam, sehingga pendekatan komunikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok. MY menjelaskan bahwa sasaran utama Program Edukasi Parlemen adalah generasi muda, khususnya pelajar, meskipun program tersebut juga terbuka bagi organisasi masyarakat dan masyarakat umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Humas DPR RI memandang generasi muda sebagai kelompok yang strategis dalam upaya membangun pemahaman mengenai fungsi parlemen. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan AD yang menyatakan bahwa karakteristik peserta pada setiap daerah maupun jenjang pendidikan memiliki perbedaan sehingga pendekatan yang digunakan juga perlu disesuaikan. Menurutnya, karakteristik peserta pada setiap kampus dan daerah berbeda-beda sehingga cara penyampaian pesan harus mempertimbangkan kondisi audiens yang dihadapi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi secara pasif, melainkan menjadi faktor yang memengaruhi bagaimana strategi komunikasi dirancang dan dijalankan.

Dalam perspektif model komunikasi Harold D. Lasswell, unsur *to whom* menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik penerima pesan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Humas DPR RI menempatkan audiens sebagai dasar utama dalam perancangan strategi komunikasi Program Edukasi Parlemen. Hal tersebut terlihat dari upaya penyesuaian bahasa, pemilihan contoh, penggunaan media, hingga bentuk penyampaian materi berdasarkan karakteristik peserta yang berasal dari berbagai kelompok, seperti pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum. Temuan ini menunjukkan bahwa audiens tidak hanya diposisikan sebagai penerima pesan, tetapi menjadi faktor yang menentukan bagaimana pesan dikonstruksi dan disampaikan. Dalam konteks ini, efektivitas

komunikasi tidak bergantung pada keseragaman penyampaian pesan, melainkan pada kemampuan komunikator dalam memahami kebutuhan dan karakteristik khalayak. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa unsur *to whom* dalam model komunikasi Lasswell memiliki peran yang sangat penting karena karakteristik audiens menjadi landasan dalam menentukan pesan, media, dan pendekatan komunikasi yang digunakan oleh Humas DPR RI untuk membangun pemahaman public mengenai fungsi parlemen. Temuan ini sejalan dengan Wiratna et al. (2022) yang menjelaskan bahwa kegiatan edukasi parlemen memiliki kontribusi dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik audiens.

Peningkatan Pemahaman Publik sebagai Efek Komunikasi Program Edukasi Parlemen

Pandangan masyarakat terhadap DPR RI pada umumnya banyak dibentuk oleh informasi yang beredar melalui media massa maupun media sosial. Akibatnya, tidak sedikit peserta yang datang dengan pemahaman dan persepsi tertentu mengenai lembaga legislatif sebelum mengikuti Program Edukasi Parlemen. Menurut AD, tujuan utama program ini bukan untuk mengarahkan masyarakat agar memiliki pandangan tertentu terhadap DPR RI, melainkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat dan mengalami secara langsung bagaimana fungsi parlemen dijalankan. Ia menjelaskan bahwa “tujuan kita cuma memperkenalkan DPR dari DPR-nya langsung, jadi dia punya sudut pandang yang dia alami sendiri”. Pengalaman tersebut memungkinkan peserta memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai DPR RI dibandingkan hanya melalui informasi yang mereka terima sebelumnya. Hal serupa juga disampaikan oleh DW yang menjelaskan bahwa setelah mengikuti kegiatan Edukasi Parlemen, banyak peserta memperoleh pemahaman baru mengenai tugas dan fungsi DPR RI. Temuan tersebut juga diperkuat oleh pengalaman AK sebagai peserta Program Edukasi Parlemen. AK mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti kegiatan, pemahamannya mengenai DPR RI masih terbatas dan lebih banyak dipengaruhi oleh pemberitaan yang cenderung menyoroti sisi kontroversial DPR RI. Setelah mengikuti program, AK memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai mekanisme kerja DPR RI serta memiliki sudut pandang yang lebih objektif terhadap lembaga tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Edukasi Parlemen tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan persepsi peserta terhadap DPR RI Sementara itu, MY menjelaskan bahwa perubahan persepsi peserta dievaluasi melalui survei kepuasan masyarakat, *post-test*, serta testimoni peserta.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dampak komunikasi yang dihasilkan Program Edukasi Parlemen tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan terbentuknya cara pandang baru terhadap lembaga legislatif. Dengan kata lain, komunikasi yang dibangun melalui program ini tidak berhenti pada transfer informasi semata, melainkan berupaya menghadirkan pengalaman yang memungkinkan masyarakat memahami fungsi parlemen secara lebih komperhensif. Dalam model komunikasi Harold D. Lasswell, unsur *with what effect* menjadi penting karena berkaitan dengan konsekuensi yang muncul setelah pesan diterima oleh khalayak. Oleh karena itu, keberhasilan Program Edukasi Parlemen tidak hanya dapat dilihat dari tersampainya pesan kepada peserta, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam membangun pemahaman dan mengurangi kesenjangan persepsi antara DPR RI dengan masyarakat. Temuan ini mendukung penelitian Prily et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kegiatan edukasi politik mampu meningkatkan literasi politik sekaligus membentuk perspektif baru terhadap lembaga legislatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan Humas DPR RI melalui Program Edukasi Parlemen tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyampaian

informasi mengenai lembaga legislatif, tetapi telah berkembang menjadi instrumen komunikasi publik yang berorientasi pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi parlemen. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak ditentukan semata oleh keberadaan pesan yang disampaikan, melainkan oleh kemampuan Humas DPR RI dalam mengelola peran sebagai komunikator, mengonstruksi pesan yang bersifat edukatif, memanfaatkan media komunikasi yang relevan, serta menyesuaikan komunikasi dengan karakteristik khalayak sasaran. Keterkaitan antar unsur tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi dalam Program Edukasi Parlemen dibangun melalui proses komunikasi yang terencana dan adaptif, sehingga komunikasi tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas diseminasi informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun literasi politik masyarakat. Dengan demikian, Program Edukasi Parlemen mempresentasikan upaya Humas DPR RI dalam memperkuat fungsi edukatif lembaga legislatif melalui pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak komunikasi yang dihasilkan tidak berhenti pada bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi yang dimiliki DPR RI, tetapi juga tercermin pada terbentuknya sudut pandang baru serta perubahan persepsi terhadap DPR RI. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas komunikasi publik tidak dapat diukur hanya berdasarkan sejauh mana pesan berhasil disampaikan kepada masyarakat, melainkan dari kemampuan komunikasi tersebut dalam menghasilkan pemahaman yang bermakna dan membangun keterhubungan antara lembaga dengan publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Program Edukasi Parlemen tidak hanya menjadi media sosialisasi kelembagaan, tetapi memiliki peran yang lebih substansial sebagai ruang edukasi politik yang berkontribusi terhadap penguatan literasi politik masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Program Edukasi Parlemen menunjukkan bahwa komunikasi publik pada lembaga legislatif akan lebih efektif ketika tidak hanya berorientasi pada penyebaran informasi, tetapi juga diarahkan pada penciptaan pengalaman komunikasi yang mampu membangun pemahaman dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Afizha, J., & Kholik, A. (2021). Penerapan komunikasi efektif 7C dalam pelayanan informasi publik oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi (JRMDK)*, *3*(1), 111–125.
- Anggara, S. D., Setyarahajoe, R., & Fadeli, M. (2025). STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS DALAM IMPLEMENTASI PENGADUAN QRRMS UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DINAS PU BINA MARGA JAWA TIMUR. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *9*. <https://doi.org/https://doi.org/10.9963/fvycdh19>
- Arifin, I. (2019). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Analysis of the Application of Government Political Democracy and Social Welfare in Indonesia A R T I K E L I N F O. *Journal of Public Administration and Government*. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jpag>
- Artarini, H., & Tihuraa, F. (2024). Fakultas Ilmu Komunikasi STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK KOMISI PENYIARAN INDONESIA (STUDI KASUS KPI PUSAT) Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. In *Communication Lens: Vol. IV* (Issue 2).
- Chandra, M., Maulana, I., Abid, M., Dzaky, T., Sapero, I., Laskar, M., Saputra, A., Fadhilah, N., & Syarif, E. (2024). *PERAN HUMAS DPR RI DALAM MEMBANGUN CITRA*

*POSITIF LEGISLASI DI MATA MASYARAKAT SERTA MEMPROMOSIKAN WISATA
SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN.*

- Falkheimer, J., & Heide, M. (2022). *Research Handbook on Strategic Communication*. Edward Elgar Publishing.
- Herlina, S. (2015). STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS DALAM MEMBENTUK CITRA PEMERINTAHAN DI KOTA MALANG. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3), 493. www.publikasi.unitri.ac.id
- Ladriansya, M. G., Syarifudin, A., & Hamandia, M. R. (2023). Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Melalui Media Sosial. *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 3(2), 517–520. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.904>
- Leston-Bandeira, C., & Siefken, S. T. (2023). The development of public engagement as a core institutional role for parliaments. *Journal of Legislative Studies*, 29(3), 361–379. <https://doi.org/10.1080/13572334.2023.2214390>
- Mucharam, A. (2022). MEMBANGUN KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 27(1).
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Prily, A., Putri, C. E., Lubis, A. Y., & Pasaribu, M. (2022). Upaya Edukasi Politik Humas DPR RI Pada Generasi Muda Melalui Program Parlemen Remaja 2021. In *Jurnal Cyber PR* (Vol. 2, Issue 1).
- Royandiah, I., Akbar, Y. M., & Rosadi, R. R. (2022). Peran Humas Setjen DPR RI Dalam Mengelola Citra Positif. In *UNIVERSITAS* (Vol. 8, Issue 2).
- Salim, W., & Parlindungan, D. R. (2021). Strategi Humas DPR RI Dalam Mengedukasi Generasi Muda Melalui Program Parlemen Remaja. *Kalbisocio: Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 8.
- Samagrahira, S. A.-R. (2023). Partisipasi Politik dalam Konsep Kedaulatan Rakyat. In *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | (Vol. 2).
- Sheldon, C. (2023). Closing the gap: establishing a ‘feedback loop’ for effective parliamentary public engagement. *Journal of Legislative Studies*, 29(3), 425–441. <https://doi.org/10.1080/13572334.2023.2195711>
- Wiratna, A., Awaliyah, S., & Mawarti, R. A. (2022). Peran humas DPR RI dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(12), 1224–1235. <https://doi.org/10.17977/um063v2i122022p1224-1235>
- Yanto, H., Irianti, E., & Yoman, M. (2024). Strategi Pengelolaan Media Sosial Humas Setjen DPR RI Dalam Mengedukasi Publik Tentang Tugas Dan Kewenangan Parlemen (Studi Kasus Instagram @EP). *Journal Of Social Science Research*, 4, 2976–2992.